



ADVOKASI PERENCANAAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER BAGI MASYARAKAT SIPIL

**ADVOKASI
PERENCANAAN PENGANGGARAN
RESPONSIF GENDER
BAGI MASYARAKAT SIPIL**

DAFTAR ISI

ADVOKASI PERENCANAAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER (PPRG) BAGI MASYARAKAT SIPIL

Penulis :

Akhmad Misbakhul Hasan
Rosniaty Azis

Editor :

Yenny Sucipto

Kontributor :

Abdul Waidl
Madekhan Ali
Mayadina Rohma Musyfiroh
Yusuf Murtiono
Yuna Farhan

Tata Letak & Ilustrator :

Age Hadi

Sekretariat Nasional
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran
Jakarta - 2013

www.seknasfitra.org

Kata Pengantar.....	iii
Daftar Istilah	v
Pendahuluan	1
Latar Belakang	1
Tujuan.....	2
Sasaran	2
Konsep Gender, PUG dan PPRG	3
Gender.....	3
Pentingnya PUG Melalui PPRG	4
Sandaran Kebijakan	5
Overview: Siklus Perencanaan dan Penganggaran Daerah	7
Advokasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	9
Penguasaan Atas Instrumen PPRG	12
Gender Analysis Pathway (GAP).....	12
Gender Budget Statement (GBS)	15
Keterkaitan Antara GAP dan GBS.....	18
Pengintegrasian GAP dan GBS dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah	20
Integrasi GAP dalam Dokumen Perencanaan Daerah.....	20
Integrasi GBS Dalam Dokumen Penganggaran Daerah	26
1. Integrasi GBS dalam Kebijakan Umum APBD (KU- APBD)	26
2. Integrasi GBS dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	27
3. Integrasi GBS dalam RKA/DPA SKPD.....	28
Penutup	30

DAFTAR LAMPIRAN

Matriks Lembar Kerja Gender Analysis Pathway (GAP)	
Dinas Pekerjaan Umum Provinsi X.....	32
Gender Analysis Pathway (GAP).....	34

KATA PENGANTAR

Salam Transparansi...

Pengarusutamaan adalah upaya/strategi yang harus dilakukan untuk memberi peluang kepada seluruh komponen atau *stakeholders* agar dapat berperan secara optimal dalam pembangunan. Pengarusutamaan Gender (*gender mainstreaming*) merupakan sebuah upaya untuk menghilangkan hambatan-hambatan yang menyebabkan tidak tercapainya Kesetaraan dan keadilan gender (marginalisasi, stereotype, subordinasi, kekerasan dan beban ganda).

Berdasarkan Inpres No. 9/2000, saat ini pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) diinstruksikan kepada seluruh kementerian maupun lembaga pemerintah dan non pemerintah di pemerintah nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota untuk melakukan penyusunan program dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dengan mempertimbangkan permasalahan kebutuhan aspirasi perempuan pada pembangunan dalam kebijakan, program dan kegiatan. Strategi tersebut dilaksanakan melalui sebuah proses yang memasukkan analisa gender ke dalam program kerja, pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan kepentingan perempuan dan laki-laki kedalam proses pembangunan.

Perencanaan dan penganggaran responsif gender merupakan instrumen untuk mengatasi adanya kesenjangan akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan yang selama ini masih ada, untuk mewujudkan keadilan dalam penerimaan manfaat pembangunan. Proses perencanaan dan penganggaran yang responsif gender sejalan dengan sistem yang sudah ada, dan tidak membutuhkan penyusunan rencana dan anggaran khusus untuk perempuan yang terpisah dari laki-laki.

Buku saku “Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender” bagi masyarakat sipil ini merupakan upaya mendorong tata kelola pemerintahan lebih memperhatikan aspek gender dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakannya. Buku ini juga hadir

tepat, ketika adanya Strategi Nasional PUG melalui Perencanaan Penganggaran Responsif Gender oleh 4 kementerian (Bappenas, Kemenkeu, Kemendagri, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), sehingga akan sangat berguna bagi masyarakat sipil untuk melakukan pengawalan perencanaan penganggaran daerah yang berprespektif gender dalam sebuah perubahan sosial. Kepada Tim *Technical Assistance Building Better Budget for Women and The Poor* serta semua pihak yang terlibat dalam penyusunan panduan ini saya sampaikan penghargaan dan terimakasih

Dewan Nasional

Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran
ZUMROTIN K. SUSILO

DAFTAR ISTILAH

Analisis Gender adalah identifikasi isu-isu gender yang disebabkan karena adanya perbedaan peran serta hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki. Analisis gender dilakukan karena perbedaan-perbedaan ini bukan hanya menyebabkan adanya perbedaan di antara keduanya dalam pengalaman, kebutuhan, pengetahuan, perhatian, tetapi juga berimplikasi pada perbedaan antara keduanya dalam memperoleh akses dan manfaat dari hasil pembangunan, berpartisipasi dalam pembangunan serta penguasaan terhadap sumberdaya.

Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah anggaran yang merespon kebutuhan, permasalahan, aspirasi dan pengalaman perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

Bias Gender adalah suatu pandangan yang membedakan peran, kedudukan, hak serta tanggung jawab laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan pembangunan.

Data Terpilah adalah data menurut jenis kelamin serta status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan.

Gender adalah perbedaan-perbedaan sifat, peranan, fungsi, dan status antara laki-laki dan perempuan yang bukan berdasarkan pada perbedaan biologis, tetapi berdasarkan relasi sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang lebih luas. Jadi, gender merupakan konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman

Gender Analysis Pathway (GAP) merupakan alat analisis gender yang digunakan untuk memetakan faktor-faktor penyebab kesenjangan gender berdasarkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat suatu program/kegiatan serta faktor penyebab kesenjangan internal maupun eksternal institusi pemerintah (SKPD).

Gender Budget Statement (GBS) adalah dokumen pertanggungjawaban spesifik gender yang disusun pemerintah

yang menunjukkan kesediaan instansi untuk melakukan kegiatan berdasarkan kesetaraan gender dan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan-kegiatan tersebut.

Gender Sensitif adalah kemampuan untuk memahami ketimpangan gender, utamanya dalam pembagian kerja dan pembuatan keputusan yang telah mengakibatkan kurangnya kesempatan dan rendahnya status sosial perempuan dibandingkan laki-laki.

Isu Gender adalah suatu kondisi yang menunjukkan kesenjangan laki-laki dan perempuan atau ketimpangan gender. Kondisi ketimpangan gender ini diperoleh dengan membandingkan kondisi yang dicita-citakan (kondisi normatif) dengan kondisi gender sebagaimana adanya (kondisi subyektif).

Keadilan Gender (*gender equity*) adalah perlakuan adil bagi perempuan dan laki-laki dalam keseluruhan proses kebijakan pembangunan, yaitu dengan mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan, kesulitan, hambatan sebagai perempuan dan sebagai laki-laki untuk mendapat akses dan manfaat dari usaha-usaha pembangunan; untuk ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan (seperti yang berkaitan dengan kebutuhan, aspirasi) serta dalam memperoleh penguasaan (kontrol) terhadap sumberdaya (seperti dalam mendapatkan/penguasaan keterampilan, informasi, pengetahuan, kredit, dan lain-lain).

Kebijakan/Program Responsif Gender adalah kebijakan/program yang responsif gender berfokus kepada aspek yang memperhatikan kondisi kesenjangan dan kepada upaya mengangkat isu ketertinggalan dari salah satu jenis kelamin.

Kesetaraan Gender (*gender equality*) adalah kesamaan kondisi dan posisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan, keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil yang dampaknya seimbang.

Kesenjangan Gender (*gender gap*) adalah ketidakseimbangan atau perbedaan kesempatan, akses, partisipasi dan manfaat

antara perempuan dan laki-laki yang dapat terjadi dalam proses pembangunan.

Netral Gender adalah kebijakan/program/kegiatan atau kondisi yang tidak memihak kepada salah satu jenis kelamin.

Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki (dan orang lanjut usia, anak-anak di bawah umur, orang-orang dengan kebiasaan berbeda/difable, serta orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi) untuk memberdayakan perempuan dan laki-laki mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dari seluruh kebijakan, program, kegiatan di berbagai bidang kehidupan pembangunan nasional dan daerah.

Perencanaan yang Responsif Gender adalah perencanaan yang dibuat oleh seluruh lembaga pemerintah, organisasi profesi, masyarakat dan lainnya yang disusun dengan mempertimbangkan empat aspek seperti: akses, partisipasi, manfaat dan kontrol yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki. Hal ini berarti bahwa perencanaan tersebut perlu mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan pihak perempuan dan laki-laki, baik dalam proses penyusunannya maupun dalam pelaksanaan kegiatan. Sehingga perencanaan ini akan terkait dalam perencanaan kebijakan maupun perencanaan program sampai operasionalnya di lapangan.

Perencanaan Berbasis Kinerja (PBK) adalah suatu pendekatan dalam sistem penganggaran yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan *output*/keluaran dan *outcome*/hasil yang diharapkan, serta memperhatikan efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.

Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan.

Profil Gender adalah kumpulan data dan informasi terpilah menurut jenis kelamin yang memperlihatkan realitas kehidupan perempuan dan laki-laki yang mengandung isu gender. Statistik gender biasanya dipakai dalam konteks kebijakan, dengan tujuan untuk (1) melihat adanya ketimpangan gender secara komprehensif; (2) membuka wawasan para penentu kebijakan atau perencana tentang kemungkinan adanya isu gender dan; (3) bermanfaat untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan/program yang responsif gender.

Responsif Gender adalah perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat yang disertai upaya menghapus hambatan-hambatan struktural dan kultural dalam mencapai kesetaraan gender.

LATAR BELAKANG

Buku ini lahir dari semangat ditetapkannya Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kebijakan Stranas tersebut berupa Surat Edaran, No. 270/M.PPN/11/2012; No. SE-33/MK.02/2012; No. 050/4379A/SJ; dan No. SE 46/MPP-PA/11/2012 yang didalamnya melampirkan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) PPRG untuk pusat dan daerah.

Meski Stranas baru ditetapkan pada November 2012 dan diluncurkan pada 5 Maret 2013, percepatan PUG melalui PPRG sendiri sudah mulai diimplementasikan di berbagai daerah. Di Provinsi Sulawesi Selatan misalnya, implementasi PPRG diatur melalui Surat Edaran Gubernur No. 910/2370/BPPKB tanggal 23 April 2012 tentang Penyusunan RKA SKPD yang Responsive Gender Prov. Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2013. Sebelumnya, ada Instruksi Gubernur No. 188.54/207/Bappeda-G.ST/2011 tentang Implementasi GBS dalam RKA SKPD di Jajaran Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2012. Dan juga Surat Edaran Gubernur No. 791/4201/XI/2012 Perihal Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di Provinsi Sulawesi Barat.

Implementasi percepatan PUG melalui PPRG di berbagai daerah di Indonesia tidak terlepas dari kuatnya komitmen Pemerintah Daerah dalam pemenuhan prasyarat-prasyarat PUG. Hampir semua daerah saat ini sudah membentuk Kelembagaan PUG, terutama Pokja PUG, Vocal Point, dan Tim Teknis ARG, meski harus diakui belum semua berkinerja baik. Paling tidak, pemahaman dan kesadaran pentingnya strategi pencapaian kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan sudah mulai tumbuh. Hal paling serius yang masih menjadi tantangan daerah dalam penerapan PPRG adalah ketersediaan data terpilah gender untuk semua sektor dan penguasaan instrumen PPRG (GAP dan GBS).

Di sisi yang lain, dorongan terus-menerus dari kalangan masyarakat sipil – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi dan kelompok masyarakat lainnya, juga mempunyai peran signifikan dalam percepatan implementasi PPRG. Strategi persuasi yang dijalankan dengan melakukan assistensi teknis kepada Pemerintah Daerah dan DPRD terbukti cukup efektif memperbaiki dokumen perencanaan dan penganggaran suatu daerah lebih responsif gender. Meski perlu diingat, sisi kritis masyarakat sipil harus terus dijaga, agar tetap ‘ada jarak’ antara kerja-kerja teknokratis dengan kerja-kerja kritis.

TUJUAN

Tujuan utama buku ini adalah memberikan petunjuk praktis bagaimana mengadvokasi proses perumusan dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran agar responsif terhadap kebutuhan laki-laki, perempuan dan masyarakat marginal, berdasarkan kesenjangan yang terjadi.

SASARAN

Buku ini sengaja dibuat se’ringan’ mungkin agar mudah dibawa, dibaca, dipahami, dan diimplementasikan oleh semua pihak, di mana pun berada. Pihak-pihak yang diharapkan membaca dan mengimplementasikan buku ini adalah kalangan masyarakat sipil, antara lain: aktivis LSM, akademisi, mahasiswa dan kelompok masyarakat lainnya, terutama yang bekerja di isu perencanaan dan penganggaran responsif gender. Buku ini dan juga Juklak PPRG yang dikeluarkan oleh Kementerian, dapat dijadikan sebagai pegangan bagi Pemerintah Daerah (Pemda) dan DPRD untuk memperbaiki substansi (content) dokumen perencanaan dan penganggaran di daerah masing-masing agar lebih responsif gender.

KONSEP GENDER, PUG DAN PPRG

Perdebatan mengenai apa itu gender oleh sebagian kalangan mungkin sudah ‘kedaluwarsa’. Namun harus diakui, dengan sistem politik yang memungkinkan sesiapa bisa memimpin pemerintahan di daerah, pembahasan mengenai Gender, PUG dan PPRG masih tetap relevan. Apalagi, klaim angka-angka pertumbuhan ekonomi suatu daerah, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan pelayanan publik dasar, tidak serta merta menghilangkan kesenjangan di tingkat masyarakat, laki-laki, perempuan, dan masyarakat marginal. Bagian ini mengupas secara singkat Konsep Gender, PUG dan PPRG.

GENDER

Saat kita hadir pada suatu forum yang diselenggarakan oleh Pemda atau DPRD, sering kali kita mendengar ungkapan, “ini, para gender baru datang..” atau silahkan gender-gender duduk di sebelah kiri..” atau “kami persilahkan gender memberi usulan ..”, dst. Ungkapan ‘gender’ tersebut selalu dialamatkan kepada perempuan. Meski dalam konteks tertentu tidak sepenuhnya salah, namun kesan bahwa membicarakan gender masih menjadi ‘kelakar’ sebagian pihak, masih cukup kuat. Hal ini kemungkinan besar juga karena ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman tentang apa itu gender.

Secara harfiah, kata gender memang dapat dipertukarkan dengan kata sex yang berarti jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Namun dalam konteks sosiologi, gender tidak hanya merujuk pada perbedaan sex/biologis semata, tetapi lebih pada perbedaan sifat, peran, fungsi, dan status antara laki-laki, perempuan, dan masyarakat marginal, berdasarkan relasi sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang lebih luas. Perbedaan tersebut berkonsekuensi pada perbedaan pemenuhan kebutuhan yang spesifik antara laki-laki, perempuan, dan masyarakat marginal, namun masih dalam kerangka kesamaan hak. Dengan demikian, gender merupakan konstruksi sosial budaya yang dapat berubah sesuai perkembangan zaman.

Persoalan yang muncul kemudian adalah ketika relasi sosial yang dibangun berjalan tidak adil. Terjadi ketimpangan pada aspek sosial ekonomi –orang sering menyebutnya ‘pemiskinan’, terjadi diskriminasi dalam pelayanan publik, terjadi stereotype, beban ganda, kekerasan, dan lain sebagainya. Dan dalam konteks Indonesia, ketimpangan, diskriminasi, stereotype, beban ganda, dan kekerasan tersebut, seringkali dialami oleh perempuan dan masyarakat marginal. Maka tidak heran jika perjuangan atas kesamaan hak identik dengan perjuangan untuk pemenuhan hak-hak perempuan dan masyarakat marginal lainnya. Meski pada dasarnya, isu gender bukan semata-mata isu perempuan, tetapi isu laki-laki, perempuan, dan masyarakat marginal yang belum mendapat keadilan dan pemerataan pembangunan. Jadi berbicara tentang keadilan gender, bukan hanya keadilan antar jenis kelamin, tetapi juga keadilan berdasarkan usia, wilayah, status sosial, dan kebutuhan yang berbeda.

PENTINGNYA PUG MELALUI PPRG

Disadari atau tidak, persoalan ketidakadilan gender sudah merasuk ke semua aspek kehidupan. Ketidakadilan pada satu aspek tidak lagi berdiri sendiri, tetapi berkelindan dengan ketidakadilan pada aspek yang lain, sehingga dalam perumusan pemecahan masalahnya harus secara komprehensif dan sinergis. Di sinilah pentingnya menerapkan Pengarusutamaan Gender (PUG).

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi yang digunakan untuk mengurangi kesenjangan antara laki-laki, perempuan dan masyarakat marginal dalam mengakses dan mendapatkan manfaat pembangunan. Strategi tersebut dapat berupa peningkatan partisipasi dan kontrol terhadap proses pembangunan. Secara teknis, PUG dilakukan dengan mengintegrasikan perspektif dan analisis gender ke dalam proses pembangunan di segala bidang. Salah satu instrumen analisis yang dapat digunakan antara lain ‘Alur Kerja Analisis Gender’ atau Gender Analysis Pathway (GAP). Hasil analisis gender ini kemudian digunakan untuk melakukan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.

Dengan demikian, perencanaan dan penganggaran, baik pusat maupun daerah, menjadi ruang dan wahana yang dianggap

sangat strategis untuk penerapan PUG. Perencanaan dan penganggaran merupakan ‘jantung’ pemerintahan dalam mengelola sumberdayanya. Apabila dalam proses perencanaan dan penganggaran dilakukan secara partisipatif, transparan, akuntabel dan menggunakan analisis gender, hampir dapat dipastikan bahwa dokumen-dokumen yang dihasilkan melalui proses tersebut juga akan responsif gender.

SANDARAN KEBIJAKAN

Sebagaimana telah disebutkan pada bagian pendahuluan, bahwa sandaran kebijakan untuk melakukan Percepatan PUG melalui PPRG saat ini berupa Surat Edaran (SE) Empat (4) Menteri. Meski bukan merupakan salah satu landasan hukum dalam hierarki perundang-undangan, dibanyak kasus, SE Menteri cukup efektif mendorong inovasi perencanaan dan penganggaran di daerah. Sebutlah misalnya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang pada awalnya juga diatur melalui SEB Menteri Dalam Negeri dan Bappenas.

Sandaran kebijakan terkait PUG dan PPRG bagi daerah yang telah terbit sebelum SE Empat (4) Menteri di atas, antara lain:

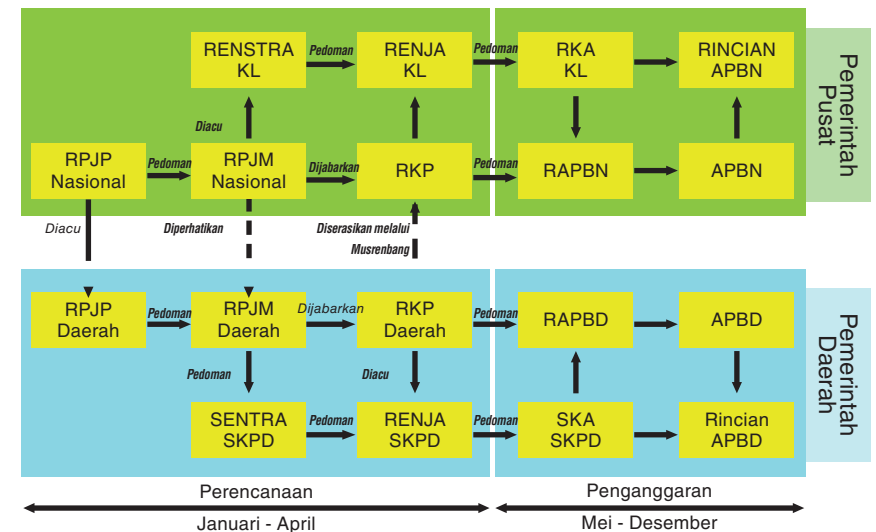
1. Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*).
2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

6. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010.
7. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan.
8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 – 2014.
9. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah.

OVERVIEW: SIKLUS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah harus tersinkronisasi sebagaimana diagram di bawah ini:

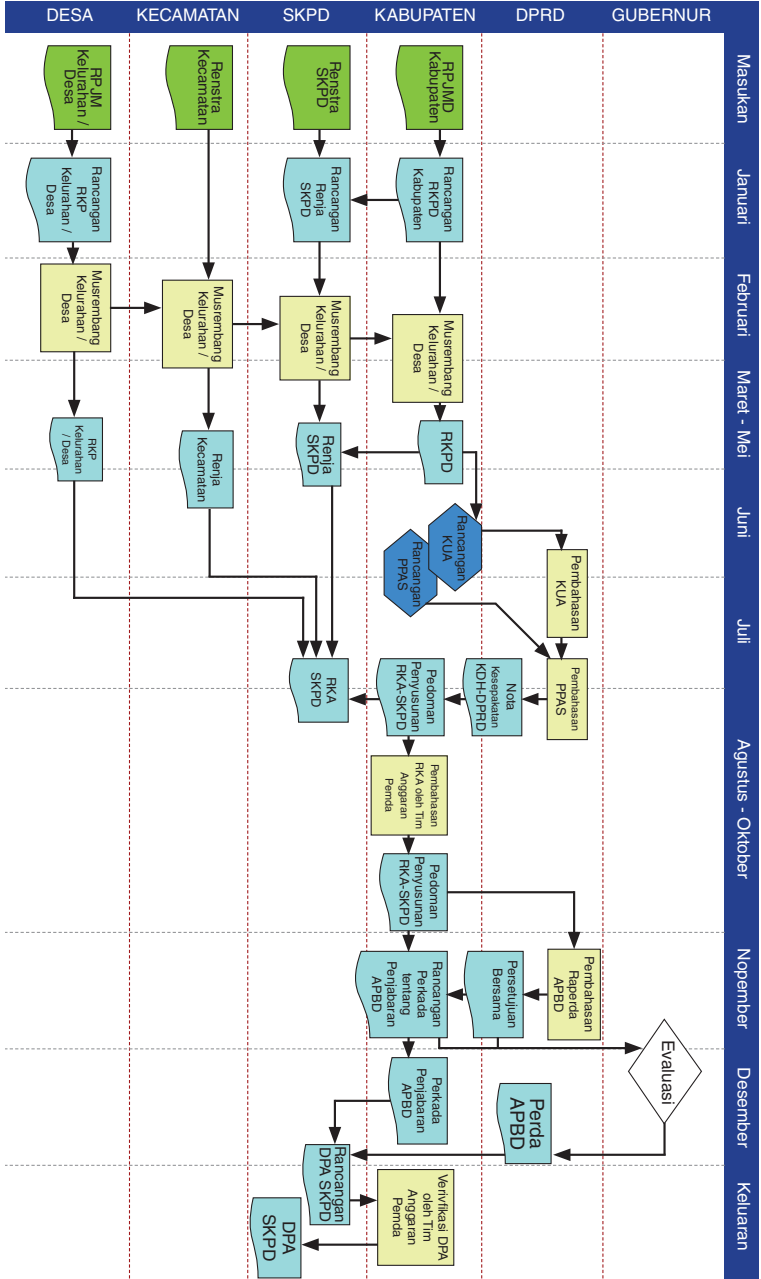
Diagram 1. Sinkronisasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pusat dan Daerah



Dalam diagram di atas, penyusunan dokumen-dokumen penganggaran (tahun n) harus mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan (tahun n) dan dokumen perencanaan jangka menengah daerah. Demikian pula, dokumen-dokumen perencanaan daerah harus mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan pusat. Proses penyusunan dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran daerah dapat dilihat pada diagram berikut:

ADVOKASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER (PPRG)

Diagram 2. Tahapan Perencanaan dan Penganggaran di Daerah



Bagi masyarakat sipil, untuk mempengaruhi agar PPRG benar-benar diimplementasikan oleh pemerintah daerah secara berkelanjutan, strategi advokasi yang digunakan adalah dengan melakukan pendekatan ‘**Persuasif**’ dan ‘**Kritis-Konfrontatif**’ terhadap Pemerintahan Daerah. Kedua pendekatan tersebut dapat diterapkan mengikuti siklus penetapan dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Ada dua tujuan utama advokasi PPRG, 1) Mendorong agar negara (Pemda dan DPRD) semakin responsif terhadap isu-isu kesenjangan gender di semua sektor; dan 2) Penguatan kapasitas masyarakat sipil agar menjadi masyarakat yang aktif (active citizen) dan kritis terhadap setiap kebijakan perencanaan dan penganggaran daerah.

Bentuk kongkrit dari ‘**strategi persuasi**’ untuk tujuan agar pemerintah daerah lebih responsif terhadap isu-isu kesenjangan gender, antara lain dengan; **Pertama**, mendorong lahirnya komitmen Pemerintah Daerah dalam melaksanakan PUG melalui PPRG di daerahnya. Komitmen tersebut dapat berupa Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Daerah, DPRD dan Masyarakat Sipil, hingga lahirnya kebijakan atau regulasi daerah, misalnya: Surat Edaran (SE) Gubernur/Walikota/Bupati atau Pergub/Perwali/Perbup tentang Implementasi PPRG, Surat Keputusan (SK) Gubernur/Walikota/Bupati tentang Kelembagaan PUG atau Perda tentang PUG melalui PPRG. **Kedua**, mendorong kinerja Kelembagaan PUG. Caranya dengan melakukan komunikasi intensif dengan Bappeda selaku Ketua Pokja PUG dan Badan Pemberdayaan Perempuan selaku Sekretariat Pokja PUG serta SKPD-SKPD yang menjadi Vocal Point PUG dan Tim Teknis ARG. Bisa juga dengan membuat forum-forum diskusi formal maupun informal. **Ketiga** adalah melakukan technical assistensi (TA) kepada SKPD dalam rangka implementasi instrumen PPRG, yakni Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement

(GBS) dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Dan, **Keempat**, mendorong penyediaan data terpilah gender di seluruh SKPD. Point ini dapat dimasukkan dalam salah satu item di MoU sehingga seluruh SKPD terikat untuk melakukannya. Dapat pula dengan mendorong peran Ketua Pokja PUG untuk memaksa seluruh SKPD membuat profil gender.

‘**Strategi persuasi**’ untuk tujuan penguatan kapasitas masyarakat sipil agar menjadi aktif (active citizen) dan kritis terhadap setiap kebijakan perencanaan dan penganggaran daerah, adalah dengan, **Pertama**, pengorganisasian kelompok-kelompok perempuan dan organisasi masyarakat sipil lainnya. Pengorganisasian ini dapat dilakukan dengan membentuk forum-forum anggaran pada tingkat desa (basis), kecamatan, kabupaten hingga provinsi. **Kedua**, melakukan pelatihan, sekolah anggaran, atau magang tentang HAM, Gender, PUG, dan PPRG, baik pada aspek pengetahuan, analisis, dan strategi advokasinya. **Ketiga**, terlibat aktif dalam seluruh proses perencanaan dan penganggaran di daerah. Agar energi ‘kritis’ tetap stabil, pembagian peran antara Tim Inti Advokasi dengan jaringan masyarakat sipil serta kelompok basis harus terumuskan dengan baik.

Apabila pendekatan-pendekatan persuasif yang dilakukan tidak menjadikan Pemerintah daerah bergeming, langkah-langkah ‘**Kritis-Konfrontatif**’ pun dapat diterapkan. **Pertama**, dengan melakukan analisis anggaran, riset dan atau audit sosial tentang pelaksanaan program dan anggaran pemerintah daerah, misalnya pelaksanaan Jamkesda, BOS, atau program lainnya. **Kedua**, membangun media kampanye dan berjejaring dengan media. Hasil analisis anggaran, riset-riset, dan atau audit sosial yang dilakukan oleh masyarakat sipil perlu disuarakan lebih ‘kencang’. Penyuaran ini dapat dilakukan dengan membuat media kampanye sendiri, misalnya bulletin, radio komunitas, pamflet, poster anggaran, buku, dan lain sebagainya. Dapat juga dengan selalu berjejaring dengan mass media, baik cetak maupun elektronik, dengan membuat press release dan policy brief tentang hasil analisis anggaran dan audit sosial. **Ketiga**, mengeluarkan petisi bersama. Petisi ini dapat terkait dengan penolakan terhadap besaran alokasi anggaran yang lebih dominan untuk belanja program/kegiatan yang belum responsif gender, netral gender, dan bias gender. **Keempat**, demonstrasi.

Demonstrasi dilakukan untuk menyikapi sebuah kebijakan yang tidak memihak kepada kelompok perempuan, masyarakat miskin dan marginal lainnya serta untuk mengungkap kasus-kasus ketidakadilan yang dialami oleh mereka.

Diagram 3. Strategi Advokasi PPRG



PENGUASAAN ATAS INSTRUMEN PPRG

Dalam Juklak PPRG yang dikeluarkan oleh empat kementerian di atas, dikenalkan dua instrumen implementasi PPRG, 1) Alur Kerja Analisis Gender atau Gender Analysis Pathway (GAP); dan 2) Pernyataan Anggaran Gender atau Gender Budget Statement (GBS). Agar advokasi PPRG yang dilakukan oleh masyarakat sipil langsung tersambung dengan kerja-kerja SKPD dalam upaya meresponsif genderkan dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, penguasaan terhadap GAP dan GBS pun menjadi prasyarat mutlak. Bagian ini mengupas dua instrumen tersebut dan langkah-langkah pengisiannya.

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

Gender Analysis Pathway (GAP) merupakan turunan dari alat analisis KOMPAS (Metode Harvard) yang menitik beratkan pada analisis faktor kesenjangan gender, khususnya pada 4 aspek: akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. GAP sering digunakan pada saat perumusan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan, misalnya RPJMD, Rentra dan Renja SKPD, RKPD, dan KUA-PPAS. Ada sembilan langkah saat menggunakan GAP sebagai alat analisis gender, yakni :

Langkah 1 : Melaksanakan analisis tujuan dan sasaran kebijakan, program dan kegiatan/*sub*-kegiatan yang ada.

Langkah 2 : Menyajikan data terpilah menurut jenis kelamin dan usia. Hasil kajian, riset, dan evaluasi dapat digunakan sebagai pembuka wawasan untuk melihat apakah ada kesenjangan gender (baik data kualitatif maupun kuantitatif). Jika data terpilah tidak tersedia, dapat menggunakan data-data proksi dari sumber lainnya.

Langkah 3 : Identifikasi faktor-faktor penyebab kesenjangan berdasarkan:

- a. Akses, yaitu identifikasi apakah kebijakan/program pembangunan telah memberikan ruang dan kesempatan yang adil bagi perempuan dan laki-laki;
- b. Partisipasi, yaitu identifikasi apakah kebijakan atau program pembangunan melibatkan secara adil bagi perempuan dan laki-laki dalam menyuarakan kebutuhan, kendala, termasuk dalam pengambilan keputusan;
- c. Kontrol, yaitu identifikasi apakah kebijakan/program memberikan kesempatan penguasaan yang sama kepada perempuan dan laki-laki untuk mengontrol sumberdaya pembangunan
- d. Manfaat, yaitu identifikasi apakah kebijakan/program memberikan manfaat yang adil bagi perempuan dan laki-laki

Langkah 4 : Identifikasi sebab kesenjangan di internal SKPD (budaya organisasi) yang menyebabkan terjadinya isu gender.

Langkah 5 : Identifikasi sebab kesenjangan di eksternal SKPD, yaitu di luar unit kerja pelaksana program, sektor lain, dan masyarakat/lingkungan target program.

Langkah 6 : Reformulasi tujuan kebijakan, program dan kegiatan/*sub*-kegiatan pembangunan menjadi responsif gender (bila tujuan yang ada saat ini belum responsif gender). Reformulasi ini harus menjawab kesenjangan dan penyebabnya yang diidentifikasi di langkah 3,4, dan 5.

Langkah 7 : Menyusun rencana aksi dan sarannya dengan merujuk isu gender yang telah diidentifikasi dan

rencana aksi tersebut merupakan rencana kegiatan/*sub*-kegiatan untuk mengatasi kesenjangan gender.

Langkah 8 : Menetapkan **base-line** atau data dasar yang dipilih untuk mengukur suatu kemajuan atau progres pelaksanaan kebijakan atau program. Data dasar tersebut dapat diambil dari data pembuka wawasan yang relevan dan strategis untuk menjadi ukuran.

Langkah 9 : Menetapkan indikator kinerja (baik capaian *output* maupun *outcome*) yang mengatasi kesenjangan gender di langkah 3, 4, dan 5.

Tabel 1. Gender Analisis Pathway (GAP)

Langkah 1	Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Identifikasi dan tuliskan tujuan dari Kebijakan/ Program/Kegiatan
Langkah 2	Data Pembuka Wawasan	Sajikan data pembuka wawasan, yang terpilah jenis kelamin dan usia, kuantitatif dan kualitatif
Langkah 3	Isu Gender	Faktor Kesenjangan Identifikasi isu gender di proses perencanaan dengan memperhatikan faktor-faktor kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat (cantumkan hanya faktor kesenjangan yang relevan).
Langkah 4		Sebab Kesenjangan Internal Identifikasi penyebab faktor kesenjangan gender yang datang dari internal pelaksana program.
Langkah 5		Sebab Kesenjangan Eksternal Identifikasi penyebab faktor kesenjangan gender yang datang dari lingkungan eksternal lembaga pada proses pelaksanaan program.
Langkah 6	Kebijakan dan Rencana Ke Depan	Reformulasi Tujuan Reformulasikan tujuan kebijakan bila tujuan yang ada saat ini belum responsif gender. Tujuan ini harus menjawab sebab kesenjangan yang diidentifikasi di langkah 3,4, dan 5.
Langkah 7		Rencana Aksi Tetapkan rencana aksi/kegiatan yang merujuk pada tujuan yang responsif gender untuk mengatasi kesenjangan dan penyebabnya yang ada di langkah 3, 4, dan 5.
Langkah 8	Pengukuran Hasil	Basis Data (Base-line) Tetapkan base-line yang diambil dari data pembuka wawasan pada langkah 2 yang relevan dengan tujuan dan dapat diukur.
Langkah 9		Indikator Kinerja Tetapkan indikator kinerja (baik capaian output maupun outcome) yang mengatasi kesenjangan gender di langkah 3,4, dan 5.

Atau menggunakan tabel vertikal sebagai berikut :

Tabel 2. Gender Analisis Pathway (GAP)

KOLOM 1	SKPD	
	Program	
	Kegiatan	
	Tujuan	
KOLOM 2	Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)	
KOLOM 3	ISU GENDER	Faktor Kesenjangan/ Permasalahan (Akses, Kontrol, Manfaat, Partisipasi)
KOLOM 4		Sebab Kesenjangan Internal (di SKPD)
KOLOM 5		Sebab Kesenjangan Eksternal (di luar SKPD)
KOLOM 6	Tujuan Responsif Gender	
KOLOM 7	Rencana Aksi	
KOLOM 8	Data Dasar	
KOLOM 9	PENGUKURAN HASIL	Output (Indikator tingkat kegiatan, 1 tahun)
		Outcome (Indikator tingkat program, 2-5 tahun)

GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)

Gender Budget Statement (GBS) atau Pernyataan Anggaran Gender merupakan dokumen akuntabilitas yang disusun oleh pemerintah daerah (SKPD) untuk menginformasikan suatu kegiatan telah responsif gender dengan indikasi adanya analisis gender dan alokasi anggarannya. GBS disusun pada saat penyusunan RKA SKPD dan dilampirkan saat pembahasan RKA-SKPD antara TAPD dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD.

Berikut adalah komponen dan cara pengisian GBS :

1. Program, Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan *Output*; rumusnya sesuai hasil restrukturisasi program/kegiatan yang tercantum dalam dokumen perencanaan (RKA). Jika program yang dicantumkan merupakan program multiyears, maka GBS disusun cukup satu saja, tetapi setiap tahun dilakukan penyesuaian sesuai dengan capaian program.

2. Tujuan *Output* Kegiatan; merupakan rumusan dicapainya *output*;
3. Analisis situasi; berisi uraian ringkas yang menggambarkan persoalan yang akan ditangani/dilaksanakan oleh kegiatan yang menghasilkan *output*. Analisis ini mencakup data pembuka wawasan, faktor kesenjangan, dan penyebab permasalahan kesenjangan gender, serta menerangkan bahwa *output*/sub *output* kegiatan yang akan dihasilkan mempunyai pengaruh kepada kelompok sasaran tertentu. Pengambilan butir-butir dari “langkah GAP” disusun dalam bentuk narasi yang singkat, padat dan mudah dipahami bagi yang membaca. Analisis ini juga menjelaskan isu gender pada sub *output*/komponen yang merupakan bagian/tahapan dalam pencapaian *output*. Isu gender dilihat dengan menggunakan aspek yaitu: akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pada level *sub-output*/komponen;
4. Rencana aksi; terdiri atas *sub-output*/komponen *input*. Pilih *sub-output*/komponen *Input* yang secara langsung mengubah kondisi kearah kesetaraan gender. Tidak semua *sub-output*/komponen *input* yang ada dicantumkan. Jika *output* tersebut mempunyai *sub-output*, bagian ini menerangkan tentang *sub-output* yang terdapat isu gendernya. Namun jika tidak mempunyai *sub-output*, maka bagian ini menerangkan komponen yang terdapat isu gendernya;
5. Besaran alokasi dana yang dibutuhkan untuk pencapaian *output*. Hasil dari capaian N-1 menjadi data pembuka wawasan pada tahun N.
6. Dampak/hasil *output* kegiatan; merupakan dampak/hasil secara luas dari pencapaian *output* kegiatan, dan dikaitkan dengan isu gender serta perbaikan ke arah kesetaraan gender yang telah diidentifikasi pada bagian analisis situasi;
7. Penanda tangan GBS adalah Kepala SKPD.

Tabel 3. Gender Budget Statement (GBS)

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)			
SKPD	: (Nama SKPD)		
TAHUN ANGGARAN	: (Tahun Anggaran)		
PROGRAM	: (Nama Program)		
KODE PROGRAM	: (Kode Program sesuai RKA SKPD)		
ANALISIS SITUASI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender). (Diambil dari GAP Langkah 2) 2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender <ol style="list-style-type: none"> a. Faktor Kesenjangan (Diambil dari GAP Langkah 3) b. Penyebab Internal (Diambil dari GAP Langkah 4) c. Penyebab Eksternal Kesenjangan Gender (Diambil dari GAP Langkah 5) 		
RENCANA TINDAK	Kegiatan 1	Rencana Aksi 1 diambil dari GAP Langkah 7	
		Tujuan	
		Sub Kegiatan Jika ada	
		Sumber daya (Input)	Dana :
			Panitia :
			Fasilitator/ narasumber :
			Peserta :
	Output	• Rumusan Kinerja: • Indikator Kinerja:	
	Sasaran		
	Kegiatan 2	Tujuan	
		Sub Kegiatan Jika ada	
		Sumber daya (Input)	Dana :
			Panitia :
			Fasilitator :
Peserta :			
Output		• Rumusan Kinerja: • Indikator Kinerja:	
Sasaran			

ALOKASI SUMBER DAYA	Anggaran	(Diisi sesuai dengan pagu anggaran pada PPAS)
	SDM	Panitia : Peserta : Narasumber : Fasilitator : Staf Pendukung :
	Alat dan Bahan	
Output		
OUTCOMES	<ul style="list-style-type: none"> • Rumusan Kinerja: • Indikator Kinerja: 	
		<p>.....,</p> <p>KEPALA SKPD</p> <p>Nama</p> <p>Pangkat/Gol</p> <p>NIP</p>

KETERKAITAN ANTARA GAP DAN GBS

Untuk menjaga konsistensi antara GAP dan GBS, perlu dikaitkan antara keduanya. Berikut adalah tabel yang menggambarkan keterkaitan antara GAP dan GBS sebagaimana berikut:

Tabel 4. Keterkaitan GAP dan GBS

Tahapan	GAP	GBS
Langkah 1	Kebijakan/program/kegiatan	Program, kegiatan, IKK, <i>output</i> kegiatan
Langkah 2	Data pembuka wawasan	Analisis situasi
Langkah 3	Faktor kesenjangan	Analisis situasi
Langkah 4	Sebab kesenjangan internal	Analisis situasi
Langkah 5	Sebab kesenjangan eksternal	Analisis situasi

Tahapan	GAP	GBS
Langkah 6	Reformulasi tujuan	Tujuan <i>output</i> /sub <i>output</i>
Langkah 7	Rencana aksi	Rencana aksi (komponen-komponen yang berkontribusi pada kesetaraan gender)
Langkah 8	Data dasar (<i>baseline</i>)	Dampak/hasil <i>output</i> kegiatan
Langkah 9	Indikator gender	Dampak/hasil <i>output</i> kegiatan

Bagi masyarakat sipil yang bekerja untuk isu PPRG, penguasaan terhadap dua instrumen di atas bersifat multak, karena dua instrumen tersebutlah yang akan digunakan oleh Pemerintah Daerah (SKPD) dalam menyusun dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran.

PENGINTEGRASIAN GAP DAN GBS DALAM DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH

GAP dan GBS mempunyai kegunaan yang berbeda tetapi saling melengkapi. GAP seringkali digunakan untuk mempertajam perspektif gender dalam dokumen-dokumen perencanaan sedangkan GBS digunakan saat penyusunan dokumen penganggaran. Bagian ini akan menguraikan bagaimana GAP dan GBS diintegrasikan dalam sistematika dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Sistematika dokumen-dokumen tersebut mengacu pada Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

INTEGRASI GAP DALAM DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH

1. Integrasi GAP dalam RPJMD

Sistematika RPJMD	Langkah Integrasi Gender	GAP Langkah 1-9
Pendahuluan	<ul style="list-style-type: none"> Memasukkan regulasi mengenai PUG dalam Dasar Hukum penyusunan RPJMD Memasukkan data dan peringkat IPM terpilah dan GDI Memasukkan data kesenjangan terpilah gender berdasarkan wilayah, usia, status sosial, dan perbedaan kemampuan yang menjadi fakta di daerah. 	Data Pembuka Wawasan
Gambaran Umum Kondisi Daerah		
Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan	Memasukkan data kontribusi perempuan dan laki-laki terhadap pendapatan asli daerah. Siapa sajakah yang berkontribusi paling besar dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), apakah PAD masih membebani kelompok perempuan atau kelompok rentan lainnya secara tidak adil.	

Sistematika RPJMD	Langkah Integrasi Gender	GAP Langkah 1-9
Analisis Isu Startegis, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan	Memasukkan isu kesenjangan dan ketidakadilan gender melalui dimensi akses, partisipasi, kontrol dan manfaat	Analisis isu kesenjangan
Isu-isu Strategis	Memasukkan faktor penyebab kesenjangan dan ketidakadilan gender yang merupakan akar persoalan ketidakadilan gender dalam pembangunan sebagai isu strategis pembangunan jangka menengah	Faktor penyebab kesenjangan internal dan eksternal
Visi Misi	Memasukkan rumusan penyelesaian masalah kesenjangan dan ketidakadilan gender dalam Penjelasan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan	Reformulasi tujuan
Strategi dan Arah Kebijakan	Memasukkan program-program responsif gender yang berkontribusi dalam mencapai keadilan dan kesetaraan gender sesuai isu yang dianalisis.	Rencana Aksi
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah		
Indikasi Rencana Program Prioritas Pembangunan Penetapan Indikator Kinerja Daerah	Memasukkan ukuran kuantitatif maupun kualitatif secara terpilah berupa <i>outcome</i> (hasil) dari setiap program hasil analisis gender sehingga dapat menunjukkan adanya kinerja pembangunan yang berkeadilan bagi perempuan dan laki-laki.	Pengukuran Hasil

2. Integrasi GAP dalam RENSTRA SKPD

Sistematika Renstra SKPD	Langkah Integrasi Gender	GAP Langkah 1-9
Gambaran umum Kondisi Pelayanan SKPD	Memasukkan data kesenjangan terpilah gender berdasarkan wilayah, usia, status sosial, dan perbedaan kemampuan yang menjadi fakta dalam pelayanan SKPD.	Data Pembuka Wawasan
Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD	Memasukkan faktor penyebab kesenjangan dan ketidakadilan gender yang merupakan akar persoalan ketidakadilan gender dalam pelayanan SKPD sebagai isu strategis	<ul style="list-style-type: none"> Analisis isu kesenjangan Faktor penyebab kesenjangan internal dan eksternal
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	Memasukkan rumusan penyelesaian masalah kesenjangan dan ketidakadilan gender dalam penjelasan visi, misi, tujuan dan sasaran pelayanan	Reformulasi tujuan

Sistematika Renstra SKPD	Langkah Integrasi Gender	GAP Langkah 1-9
Kebijakan dan Program	Memasukkan rencana aksi responsif gender yang tujuan akhirnya adalah mencapai keadilan dan kesetaraan gender sesuai isu yang dianalisis.	Rencana Aksi
Perumusan Rencana Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif	Memasukkan ukuran kuantitatif maupun kualitatif berupa <i>output</i> dari setiap rencana aksi hasil analisis gender dan <i>outcome</i> (hasil atas pengaruh adanya <i>output</i>). Hal itu untuk menunjukkan kinerja pelayanan yang mengurangi atau menghapuskan kesenjangan gender	Pengukuran Hasil

3. Integrasi GAP dalam RKPD

Sistematika RKPD	Langkah Integrasi Gender	GAP Langkah 1-9
Evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun lalu	Memasukkan data capaian kinerja tahun lalu secara terpilah gender dan data-data kesenjangan dan ketidakadilan gender yang menjadi fakta di daerah sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu. Memasukkan kesenjangan dan ketidakadilan gender dan faktor penyebabnya baik internal maupun eksternal berdasarkan data kesenjangan capaian kinerja RKPD tahun lalu dimasukkan dalam rumusan masalah pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Data Pembuka Wawasan • Analisis kesenjangan gender • Analisis faktor penyebab kesenjangan internal dan eksternal
Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah beserta Kerangka Pendanaan	Memasukkan data kontribusi perempuan dan laki-laki terhadap pendapatan asli daerah. Siapa sajakah yang berkontribusi paling besar dalam PAD, apakah PAD masih membebani kelompok perempuan atau kelompok rentan lainnya secara tidak adil.	
	Memasukkan rencana aksi responsif gender yang tujuan akhirnya adalah mencapai keadilan dan kesetaraan gender sesuai isu yang dianalisis.	Rencana Aksi Pengukuran Hasil (indikator <i>output</i> dan <i>outcome</i>)

4. Integrasi GAP dalam Renja SKPD

Sistematika Renja SKPD	Langkah Integrasi Gender	GAP Langkah 1-9
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Urusan pemerintahan daerah, uraian nama bidang urusan pemerintahan daerah; sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, uraian judul program yang direncanakan dan uraian judul kegiatan yang direncanakan (Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)	<ul style="list-style-type: none"> • Data Pembuka Wawasan • Analisis kesenjangan gender • Analisis faktor penyebab kesenjangan internal dan eksternal
Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Uraian indikator hasil program yang akan dicapai selama periode Renstra SKPD yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam Renstra SKPD, atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi. Indikator kinerja kegiatan (<i>output/keluaran</i>), adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik, yang diharapkan dapat mengurangi ketimpangan gender. Indikator atau tolok ukur keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Indikator kinerja kegiatan yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif masukan, keluaran yang akan dicapai dari kegiatan yang menampilkan data terpilah, jika kegiatan tersebut melibatkan perempuan dan laki-laki. Tetapi jika hasil dari kegiatan tersebut berupa fisik, maka target kerjanya disesuaikan dengan volume hasil kegiatan, dengan mempertimbangkan aspek konsistensi dan rumusan indikator dan kerangka kinerja logis.	

Sistematika Renja SKPD	Langkah Integrasi Gender	GAP Langkah 1-9
Rencana Tahun (tahun anggaran n+1)	Lokasi	Rencana Aksi (Langkah 7)
	Target capaian kinerja	Indikator Kinerja (Langkah 9)

Sistematika Renja SKPD	Langkah Integrasi Gender	GAP Langkah 1-9
Rencana Tahun (tahun anggaran n+1)	<p>Jumlah dana yang dibutuhkan untuk mendanai program/kegiatan pada tahun rencana</p> <p>Memuat kebutuhan dana untuk tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan, yang mempertimbangkan aspek ekonomi, efisien, dan efektif.</p> <p>Diisi dengan objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah yang dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan program dan kegiatan, antara lain:</p> <p>PAD, terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.</p> <p>Dana Perimbangan, terdiri dari: dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus.</p> <p>Lain-lain pendapatan daerah yang sah, terdiri dari: pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.</p> <p>Penerimaan pembiayaan, terdiri dari: sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah.</p> <p>Catatan : objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah sesuai dengan kewenangan provinsi/kabupaten/kota.</p>	

Sistematika Renja SKPD	Langkah Integrasi Gender		GAP Langkah 1-9
Catatan Penting		Catatan atas program/kegiatan yang diusulkan (program/kegiatan lanjutan, program/kegiatan mendesak, rancangan awal RKPD, prioritas hasil analisis kebutuhan, dsb), dengan tetap mengacu pada analisis gender, yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan gender.	<ul style="list-style-type: none"> Data Pembuka Wawasan (Langkah 2) Isu Kesenjangan (Langkah 3-5) Reformulasi Tujuan (Langkah 6) Rencana Aksi (Langkah 7)
Prakiraan Maju Rencana Tahun	Target capaian kinerja	Target kinerja terukur dari capaian program/kegiatan untuk prakiraan maju pada tahun berikutnya sesudah tahun rencana, yang mempertimbangkan aspek keberlanjutan dari program tahun sebelumnya berdasarkan analisis gender untuk mengurangi kesenjangan gender.	<ul style="list-style-type: none"> Data Dasar (Langkah 8) Indikator Kinerja (Langkah 9)
	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Jumlah dana yang dibutuhkan untuk mendanai program/kegiatan prakiraan maju, dengan mempertimbangkan aspek ekonomis, efektif, dan efisien.	

INTEGRASI GBS DALAM DOKUMEN PENGANGGARAN DAERAH

1. Integrasi GBS dalam Kebijakan Umum APBD (KU-APBD)

Sistematika KU-APBD	Langkah Integrasi Gender
Pendahuluan: <ul style="list-style-type: none"> Latar belakang penyusunan KUA Tujuan penyusunan KUA Dasar hukum penyusunan KUA 	Memasukkan data kesenjangan gender dan indikator kesetaraan gender (GDI/ IPG dan GEM/IDG) baik indikator dampak, <i>outcome</i> dan <i>output</i> maupun data kesenjangan gender yang ada dalam RPJMD dan RKPD

Sistematika KU-APBD	Langkah Integrasi Gender
Kerangka Ekonomi Makro Daerah: <ul style="list-style-type: none"> Perkembangan indikator ekonomi makro daerah tahun sebelumnya Rencana target ekonomi makro pada tahun perencanaan 	Memasukkan analisis gender dalam kerangka ekonomi makro, misalnya memasukkan kontribusi perempuan dalam PDRB, walaupun sifatnya bisa jadi masih indikatif. Misalnya, bila PDRB di daerah tersebut dikontribusikan oleh sektor pertanian atau UKM, bisa diasumsikan kontribusi perempuan juga tinggi karena mereka banyak berperan di sektor tersebut.
Asumsi Dasar dalam Penyusunan RAPBD: <ul style="list-style-type: none"> Asumsi dasar dalam APBN Laju inflasi Pertumbuhan PDRB, lain-lain asumsi 	
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah: <ul style="list-style-type: none"> Pendapatan daerah: kebijakan perencanaan pendapatan, target pendapatan daerah, upaya mencapai target Belanja Daerah: total perkiraan belanja, kebijakan belanja, kebijakan pembangunan daerah dan prioritas pembangunan nasional yang akan dilaksanakan di daerah, kebijakan belanja berdasar urusan dan SKPD Pembiayaan Daerah: kebijakan penerimaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan 	<ul style="list-style-type: none"> Memasukkan data kontribusi perempuan dan laki-laki terhadap pendapatan asli daerah usaha. Memasukkan perkiraan belanja dengan mengacu pada hasil analisis gender pada dokumen perencanaan (RKPD dan Renja SKPD terkait) Memasukkan kebijakan belanja berdasarkan urusan dan SKPD dengan memuat alokasi belanja yang responsif gender pada belanja langsung, pada program atau kegiatan yang penerima manfaatnya adalah masyarakat.

2. Integrasi GBS dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Sistematika PPAS	Langkah Integrasi Gender
<ul style="list-style-type: none"> Plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan dan program/kegiatan: Plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan secara deskriptif dalam bentuk tabel 	Memastikan program dan alokasi anggaran untuk pemberdayaan perempuan sebagai urusan wajib pada plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan.
Plafon anggaran sementara berdasarkan program kegiatan: berisikan plafon anggaran sementara berdasarkan program kegiatan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi	Program tersebut harus konsisten dan berkontribusi untuk pencapaian tujuan dan target dalam RKPD yang telah menggunakan analisis gender.

Sistematika PPAS	Langkah Integrasi Gender
Plafon anggaran sementara untuk belanja pegawai, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, secara deskriptif dalam bentuk tabulasi	<ul style="list-style-type: none"> Mengidentifikasi program/kegiatan dari urusan di luar pemberdayaan perempuan yang termasuk pada program yang responsif gender (spesifik, afirmatif, atau mendorong kesetaraan), dan alokasi anggarannya. Program yang teridentifikasi, harus konsisten dan berkontribusi untuk pencapaian tujuan dan target dalam RKPJ yang telah menggunakan analisis gender.
Rincian pembiayaan daerah: berisi target penerimaan, pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah	<ul style="list-style-type: none"> Mengidentifikasi jenis belanja tidak langsung, misalnya pada alokasi belanja hibah dan bantuan sosial, yang sasarannya adalah masyarakat. Memastikan <i>output</i> dan <i>outcome</i> pada poin 5, konsisten dan berkontribusi untuk pencapaian tujuan dan target RKPJ yang telah menggunakan analisis gender.

3. Integrasi GBS dalam RKA/DPA SKPD

Sistematika RKA SKPD	Langkah Integrasi Gender
Urusan pemerintahan	Sesuai Permendagri tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Organisasi	Sesuai Permendagri tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Program	Pada bagian Program, harus diperhatikan apakah program tersebut spesifik, afirmatif, dan mendorong kesetaraan ataukah kegiatan secara umum. Program ini harus dipertimbangkan untuk menyelesaikan satu isu gender tertentu, sesuai Renja SKPD.
Kegiatan	Penentuan kegiatan, memperhatikan apakah kegiatan tersebut spesifik, afirmasi, dan mendorong kesetaraan ataukah kegiatan secara umum yang bertujuan menyelesaikan kesenjangan gender. Kegiatan ini harus strategis untuk menyelesaikan satu isu gender tertentu.
Lokasi Kegiatan	Penentuan lokasi kegiatan mempertimbangkan keterlibatan perempuan dan laki-laki atau kelompok rentan lainnya. Selain itu penentuan wilayah harus mempertimbangkan tingkat kesenjangan gender atau prevalensi kasus berbasis gender yang tinggi.
Jumlah tahun	

Sistematika RKA SKPD	Langkah Integrasi Gender
Capaian program	Capaian program mempertimbangkan aspek konsistensi dan rumusan indikator dengan kerangka kinerja logis, serta sejauhmana kontribusinya untuk penyelesaian isu gender yang ada di daerah. Capaian program merupakan <i>outcome</i> RPJMD pada tahun berjalan
Masukan	<ul style="list-style-type: none"> Berupa dana, SDM (fasilitator/narasumber) atau hasil pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya, jika merupakan program multiple year (tahun jamak). Masukan (<i>Input</i>), diisi berupa jumlah dana, SDM (fasilitator/narasumber) atau hasil pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya, jika merupakan program multiple year.
Keluaran	Pada bagian keluaran, diisi dengan indikator yang jelas sesuai dengan jenis kegiatan yang dilaksanakan dan target kinerja yang menampilkan data terpilah, jika kegiatan tersebut melibatkan perempuan dan laki-laki. Tetapi jika hasil dari kegiatan tersebut berupa fisik, maka target kinerjanya disesuaikan dengan volume hasil kegiatan, dengan mempertimbangkan aspek konsistensi dan rumusan indikator dan kerangka kinerja logis.
Hasil	Hasil, diisi dengan indikator yang jelas sesuai dengan jenis kegiatan yang dilaksanakan dan target kinerja yang menampilkan data terpilah, jika kegiatan tersebut melibatkan perempuan dan laki-laki. Tetapi jika hasil dari kegiatan tersebut berupa fisik, maka target kinerjanya disesuaikan dengan apa yang menjadi target dari hasil pembangunan fisik tersebut, dengan mempertimbangkan aspek konsistensi dan rumusan indikator dengan kerangka kinerja logis.
Kelompok Sasaran Kegiatan	Mempertimbangkan keterlibatan perempuan, laki-laki, dan kelompok rentan lainnya.
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan SKPD	Alokasi anggaran per jenis belanja berdasarkan perhitungan yang rasional dengan memperhatikan aspek efisiensi, efektifitas, ekonomis, dan kontribusinya untuk pencapaian manfaat sesuai dengan indikator kegiatan

PENUTUP

Advokasi PPRG yang disajikan dalam buku ini bisa dimulai dari mana saja, tergantung kebutuhan dan momentum proses perencanaan dan penganggaran yang ada di daerah. Strategi advokasi yang digunakan pun bisa sangat dinamis, bisa persuasif, bisa kritis-konfrontatif, atau memadukan keduanya. Yang perlu diingat, sebagian besar Pemerintah Daerah masih menganggap PPRG ini hal baru, sehingga dalam pengawalannya butuh rentang waktu yang panjang. Namun paling tidak, lahirnya buku ini akan melempangkan ruang bagi 'Percepatan PUG melalui PPRG' karena turut didorong oleh masyarakat sipil.

LAMPIRAN

Matriks Lembar Kerja Gender Analysis Pathway (GAP) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi X

KOLOM 1	SKPD	Pekerjaan Umum
	Program	Penyediaan sarana dan prasarana air minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan bagi masyarakat
	Kegiatan	Pembangunan Jaringan Air Bersih Desa
	Tujuan	Tersedianya akses air minum yang aman melalui fasilitasi dan sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan dalam rangka pencapaian target MDG's.
KOLOM 2	Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)	Berdasarkan target pencapaian pelayanan air minum sesuai dengan target MDG's Nasional sampai tahun 2015 yaitu 68,87% untuk air bersih dan target untuk sanitasi 75% dari total jumlah penduduk pada suatu daerah. Di Provinsi X sampai tahun 2011, pencapaian target air minum baru mencapai 46,01% atau 478.476 jiwa (296.147 perempuan dan 182.329 laki-laki) dan sanitasi mencapai 51% atau 530.484 jiwa (282.625 perempuan dan 247.859 laki-laki)
KOLOM 3	ISU GENDER	Faktor Kesenjangan/ Permasalahan (Akses, Kontrol, Manfaat, Partisipasi) Akses: Masyarakat masih susah dalam memperoleh air bersih terutama daerah tertinggal, pedesaan dan pulau. Partisipasi: Tidak adanya keterlibatan masyarakat daerah tertinggal, pedesaan, dan pulau dari perencanaan sampai pada penyediaan air bersih. Masyarakat terutama perempuan tidak dilibatkan dalam perencanaan air bersih. Kontrol: Masyarakat terutama perempuan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan pipanisasi Manfaat: Jumlah masyarakat yang belum terlayani masih banyak sehingga tingkat pemenuhan kebutuhan sanitasi yang sehat masih rendah.
KOLOM 4		Sebab Kesenjangan Internal (di SKPD) <ul style="list-style-type: none"> Lemahnya pengelolaan data base penduduk yang membutuhkan pelayanan air minum Target kinerja yang rendah sedangkan tingkat Kebutuhan pelayanan tinggi Kurangnya koordinasi lintas SKPD
KOLOM 5		Sebab Kesenjangan Eksternal (di luar SKPD) <ul style="list-style-type: none"> Belum menjadi isu prioritas dalam pembahasan DPRD Minimnya alokasi anggaran untuk penyediaan air bersih

KOLOM 6	Tujuan Responsif Gender	<ol style="list-style-type: none"> Tersedianya layanan air bersih untuk keseluruhan masyarakat (perempuan dan laki-laki) Provinsi X. Terpenuhinya 1.062.883 jiwa layanan air bersih (540.969 perempuan dan 521.914 laki-laki).
KOLOM 7	Rencana Aksi	<p>Program dan Kegiatan</p> <p>Internal:</p> <ol style="list-style-type: none"> Assesment kebutuhan masyarakat yang membutuhkan layanan air bersih. Peningkatan kemampuan SDM SKPD Menjalin komunikasi untuk perencanaan di internal SKPD dan pihak terkait. <p>Eksternal:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menjalin komunikasi dengan legislative/TAP Pengadaan layanan air bersih untuk masyarakat Provinsi X terutama masyarakat daerah tertinggal, pedesaan, dan kepulauan Kegiatan: Pengadaan Pipa Air Bersih dan Pengadaan Bak Penampungan Air Bersih.
KOLOM 8	Data Dasar	Pada 2011, pencapaian target air minum baru mencapai 46,01% atau 478.476 jiwa (296.147 perempuan dan 182.329 laki-laki) dan sanitasi mencapai 51% atau 530.484 jiwa (282.625 perempuan dan 247.859 laki-laki)
KOLOM 9	PENGUKURAN HASIL	<p>Output (Indikator tingkat kegiatan, 1 tahun)</p> <p>Rumusan : Meningkatnya akses air bersih bagi masyarakat</p> <p>Indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> Perencanaan kegiatan di lokasi kegiatan melibatkan perempuan minimal 30% Tersedia akses air minum yang aman melalui fasilitasi dan sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari target 1.500 KK.
		<p>Outcome (Indikator tingkat program, 2-5 tahun)</p> <p>Rumusan Outcome : Meningkatnya kualitas sanitasi dan kesehatan masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya cakupan layanan air bersih di pedesaan 30% dari total jumlah KK. Tersedianya akses air bersih untuk semua masyarakat Derajat kesehatan masyarakat terutama ibu dan anak meningkat Menurunnya jumlah complain masyarakat

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

KOLOM 1	SKPD	DINAS KOPPERINDAG PROVINSI X
	Program	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
	Kegiatan	Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Berkualitas
	Tujuan	Meningkatnya jumlah kelembagaan koperasi kategori aktif dan dalam peringkat berkualitas.
KOLOM 2	Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)	<ul style="list-style-type: none"> Data capaian kinerja tahun 2012, dari total jumlah kopersi Provinsi X sebanyak 1.030 koperasi, terapat 648 koperasi (63%) dalam kategori aktif dan 382 koperasi (37%) dalam kategori tidak aktif. Dilihat dari keanggotaan koperasi, jumlah anggota laki-laki berjumlah 75.589 orang, dan jumlah anggota perempuan 50.946, sehingga total anggota koperasi sebanyak 126.574 orang. Dimana dari total koperasi aktif tersebut belum ada Koperasi Wanita yang masuk kategori Berkualitas maupun cukup berkualitas. Rendahnya kapasitas koperasi wanita terutama pada kecilnya permodalan. Posisi manajerial kelembagaan koperasi masih didominasi oleh pengurus laki-laki (90%) dan pengurus perempuan (10%).
KOLOM 3	ISU GENDER	<p>Faktor Kesenjangan/ Permasalahan (Akses, Kontrol, Manfaat, Partisipasi)</p> <p>Akses:</p> <ul style="list-style-type: none"> Koperasi kategori tidak aktif masih kesulitan menjangkau kekuatan permodalan dari Bank, sehingga menyebabkan daya saing koperasi masih kalah dengan pelaku usaha non koperasi. Hal di atas menyebabkan masih rendahnya akses perempuan di Provinsi X terhadap informasi dan keterampilan dalam mengembangkan manajemen koperasi. Dalam banyak kegiatan pembinaan dan pelatihan pengurus koperasi, proporsi keikutsertaan pengurus perempuan masih jauh lebih kecil dari pengurus laki-laki. Koperasi wanita mendominasi jumlah koperasi kategori tidak aktif dikarenakan kualitas kelembagaan dan akses permodalan, maupun volume usaha yang terbatas. <p>Kontrol:</p> <ul style="list-style-type: none"> Masih banyak UKM yang lebih banyak meminjam uang kepada tengkulak dibandingkan di koperasi <p>Manfaat:</p> <ul style="list-style-type: none"> Banyak program pemerintah belum bisa di manfaatkan oleh koperasi wanita

KOLOM 4	ISU GENDER	Sebab Kesenjangan Internal (di SKPD)	<ul style="list-style-type: none"> Belum ada prioritas dalam melakukan sosialisasi tentang perkoperasian khususnya kepada organisasi atau kelompok perempuan. Belum adanya kontinuitas pelatihan dan pembinaan manajerial bagi pengurus Koperasi. Belum adanya kontinuitas penyediaan data dari Kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi mengenai perkembangan koperasi secara terpilah, antara koperasi umum dengan koperasi wanita.
KOLOM 5		Sebab Kesenjangan Eksternal (di luar SKPD)	<ul style="list-style-type: none"> Masihkurangnya minat masyarakat dalam berkoperasi terutama akibat masih rendahnya kepercayaan kepada keberlanjutan usaha koperasi. Pemahaman pelaku UKM perempuan masih kurang tentang pentingnya mendirikan ataupun menjadi anggota koperasi Pelaku UKM perempuan lebih suka meminjam modal usaha ke tengkulak dari pada kepada koperasi. Masih rendahnya tingkat pertumbuhan dan perluasan usaha koperasi wanita dan UKM. Masih kecilnya kekuatan modal dari alokasi APBD untuk pengembangan modal Koperasi Wanita.
KOLOM 6	Tujuan Responsif Gender	Meningkatnya jumlah kelembagaan koperasi kategori aktif dan dalam peringkat berkualitas dengan mengoptimalkan keberdayaan koperasi wanita	
KOLOM 7	Rencana Aksi	Pengembangan kelembagaan dan permodalan koperasi wanita.	
KOLOM 8	Data Dasar	<ul style="list-style-type: none"> Tahun 2012, terdapat 648 (63%) koperasi dalam kategori aktif dan 382 (37%) koperasi dalam kategori tidak aktif. Jumlah anggota laki-laki berjumlah 75.589 orang (60%) dan jumlah anggota perempuan 50.946 orang (40%). Belum ada Koperasi Wanita yang masuk kategori Berkualitas maupun cukup berkualitas. Posisi manajerial kelembagaan koperasi masih didominasi oleh pengurus laki-laki (90%) dan pengurus perempuan (10%). 	

KOLOM 9	PENGUKURAN HASIL	Indikator Gender	<p>Output:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kehadiran minimal 30% peserta perempuan dalam pelatihan peningkatan kapasitas manajerial koperasi. 2. Adanya 20% peserta perempuan dalam Bimtek petugas pembina koperasi dalam Pelayanan pendampingan KUR. 3. Adanya media-media sosialisasi Undang-undang Perkoperasian dan sosialisasi pentingnya berkoperasi khususnya bagi pelaku usaha perempuan. 4. Adanya skema bantuan (hibah) APBD Provinsi X dan APBD Kabupaten/Kota se Provinsi X untuk perkuatan permodalan Koperasi Wanita. 5. Adanya fasilitasi akses permodalan dari program KUR (Kredit Usaha Rakyat) khusus untuk Koperasi Wanita. 6. Terselenggaranya pertemuan pemantapan perkoperasian bagi perempuan. <p>Outcome:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Di Tahun 2014, jumlah anggota koperasi naik, dengan proporsi antara anggota laki-laki dengan perempuan masing-masing 55% dan 45%. 2. Di Tahun 2014, terdapat 10% dari jumlah koperasi berkualitas berasal dari koperasi wanita. 3. Di Tahun 2014, terdapat 20% pengurus koperasi berasal dari perempuan.

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT) SKPD : DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI X																																						
DINAS	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI X																																					
PROGRAM	<i>Pengelolaan Pendidikan Nonformal</i>																																					
KEGIATAN	<i>Pendidikan Keaksaraan Fungsional</i>																																					
OUTPUT KEGIATAN	Angka Melek Huruf (AMH) 97,5%																																					
TUJUAN OUTPUT	Meningkatkan angka melek huruf Provinsi X dari 96% menjadi 97,5%																																					
ANALISIS SITUASI	<p>Sampai Tahun 2010, Angka Melek Huruf (AMH) Provinsi X di angka 96%. Angka ini secara indikator gender, terungkap bahwa AMH Laki-laki 96,44% dan AMH sebesar 95,58. Sebagaimana tergambar pada Tabel berikut;</p> <p style="text-align: center;">TABEL X Angka Melek Huruf Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi X Tahun 2010</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Kabupaten/Kota</th> <th colspan="3">Angka Melek Huruf</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>Rata-rata</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PROVINSI X</td> <td>96.44</td> <td>95.58</td> <td>96.01</td> </tr> <tr> <td>Kabupaten A</td> <td>96.62</td> <td>95.41</td> <td>96.02</td> </tr> <tr> <td>Kabupaten B</td> <td>94.55</td> <td>95.08</td> <td>94.82</td> </tr> <tr> <td>Kabupaten C</td> <td>97.78</td> <td>96.57</td> <td>97.18</td> </tr> <tr> <td>Kabupaten D</td> <td>97.84</td> <td>97</td> <td>97.42</td> </tr> <tr> <td>Kabupaten E</td> <td>93.75</td> <td>95.76</td> <td>94.76</td> </tr> <tr> <td>Kota X</td> <td>99.31</td> <td>99.7</td> <td>99.51</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber: IPG Provinsi X, 2011</p> <p>Dengan capaian AMH ini, menjadi salah satu faktor rendahnya IPG Provinsi X yang berada di angka 56,98.</p> <p>Tabel tersebut juga menggambarkan bahwa persoalan kesenjangan gender dalam AMH juga terutama terlihat di Kabupaten A dan Kabupaten C.</p> <p>Selama ini, persoalan tingginya angka buta aksara pada kelompok perempuan memang terlihat di Provinsi X, terutama di beberapa kabupaten dimana disebabkan antara lain;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masih tingginya beban ekonomi masyarakat khususnya bagi warga kurang mampu • Masih terbatasnya akses dan mutu layanan pendidikan yang merata. • Belum mencukupinya dana pendidikan terutama pemerataan penyelenggaraan keaksaraan fungsional. • Belum adanya sharing biayapendidikan untuk keaksaraan fungsional yang terpadu antara Pemprov, Pemkab/kota dan Pemerintahan pusat. • Pemahaman masyarakat masih kurang tentang pentingnya pendidikan. 			Kabupaten/Kota	Angka Melek Huruf			L	P	Rata-rata	PROVINSI X	96.44	95.58	96.01	Kabupaten A	96.62	95.41	96.02	Kabupaten B	94.55	95.08	94.82	Kabupaten C	97.78	96.57	97.18	Kabupaten D	97.84	97	97.42	Kabupaten E	93.75	95.76	94.76	Kota X	99.31	99.7	99.51
	Kabupaten/Kota	Angka Melek Huruf																																				
L		P	Rata-rata																																			
PROVINSI X	96.44	95.58	96.01																																			
Kabupaten A	96.62	95.41	96.02																																			
Kabupaten B	94.55	95.08	94.82																																			
Kabupaten C	97.78	96.57	97.18																																			
Kabupaten D	97.84	97	97.42																																			
Kabupaten E	93.75	95.76	94.76																																			
Kota X	99.31	99.7	99.51																																			

ANALISIS SITUASI	<p>Sementara, sejauh ini Pemprov. X telah melaksanakan upaya peningkatan angka melek huruf dengan strategi program antara lain;</p> <ul style="list-style-type: none"> Menentukan daerah prioritas, yaitu 2 kabupaten terbesar buta aksaranya yaitu Kabupaten B dan Kabupaten E. Sistem blok, sistem ini ditekankan dalam upaya memberantas secara tuntas di suatu kecamatan atau kabupaten yang terbesar buta aksaranya. Pendekatan vertikal, melalui kebijakan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi sampai pada tingkat pelaksana teknis di Kabupaten/kota, Pendekatan horisntal, dalam pendekatan ini pemerintah provinsi melakukan kerjasama formal dengan perguruan tinggi, organisasi perempuan, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan. <p>Sementara, sejauh ini Pemprov. X telah melaksanakan upaya peningkatan angka melek huruf dengan strategi program antara lain;</p> <ul style="list-style-type: none"> Menentukan daerah prioritas, yaitu 2 kabupaten terbesar buta aksaranya yaitu Kabupaten B dan Kabupaten E. Sistem blok, sistem ini ditekankan dalam upaya memberantas secara tuntas di suatu kecamatan atau kabupaten yang terbesar buta aksaranya. Pendekatan vertikal, melalui kebijakan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi sampai pada tingkat pelaksana teknis di Kabupaten/kota, Pendekatan horisntal, dalam pendekatan ini pemerintah provinsi melakukan kerjasama formal dengan perguruan tinggi, organisasi perempuan, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan. <p>Dalam rangka menjaga warga terutama perempuan agar dalam tingkat melek hurufnya semakin menurun kesenjangannya dengan laki-laki, maka beberapa komponen isu gender bisa diuraikan;</p> <ul style="list-style-type: none"> Para pemangku kepentingan di 4 kabupaten tertinggi buta aksaranya, memiliki data buta aksara berdasarkan jenis kelamin (by name and by address). Adanya pendekatan pemberantasan buta aksara yang memprioritaskan buta aksara perempuan. Tersedianya data warga laki-laki dan perempuan yang telah menyelesaikan kegiatan keaksaraan dasar; Tersedianya tutor laki-laki dan perempuan secara seimbang dalam penyelenggaraan kegiatan keaksaraan fungsional. Adanya garis besar rencana dan program keaksaraan fungsional yang memfasilitasi kebutuhan laki-laki dan perempuan; Isntrumen pembiayaan program dengan mencantumkan kebutuhan laki-laki dan perempuan. Jumlah aparat pelaksana dan fasilitas sarana prasarana dengan mempertimbangkan kebutuhan laki-laki dan perempuan

RENCANA TINDAK	Peningkatan Angka Melek Huruf dengan pemberantasan buta aksara yang lebih memprioritaskan buta aksara perempuan melalui pendekatan kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional, dengan mendorong keswadayaan kelompok masyarakat, terutama organisasi perempuan, didukung sharing anggaran dan koordinasi terutama dengan 4 kabupaten tertinggi buta aksara.	
	Komponen 1	Peningkatan mutu pembelajaran pendidikan keaksaraan fungsional.
	Komponen 2	Peningkatan efektifitas pendidikan keaksaraan dengan memastikan perempuan dan laki-laki mengikuti kegiatan keaksaraan fungsional berbasis kelompok belajar usaha (KBU) yang produktif dalam meningkatkan pendapatan keluarganya.
	Komponen 3	Peningkatan kapasitas manajerial kelembagaan pelaksana program keaksaraan pendidikan non formal, terutama peyelenggara dari organisasi perempuan.
	Komponen 4	Pelaksanaan evaluasi terpadu dan partisipatif terkait program pendidikan keaksaraan
	Komponen 5	Penyusunan Rencana Teknis Tahun 2013.
ANGGARAN	Rp. 5.000.000.000,-	
INDIKATOR HASIL	<p>Meningkatnya angka melek huruf (AMH) Provinsi X Tahun 2013; laki-laki dari 96,44% di Tahun 2012 menjadi 97,5% di Tahun 2013, dan perempuan dari 95,58% menjadi 97,5% sehingga capaian rata-rata AMH Provinsi X pada angka 97,5% pada Tahun 2013.</p> <p>Menurunnya angka buta aksara di Provinsi X secara signifikan dengan dibarengi adanya penurunan disparitas gender AMH yang lebih kecil dibanding Tahun 2012.</p> <p>Meningkatnya partisipasi perempuan dan laki-laki dalam membentuk KBU baru sehingga ekonomi keluarga warga buta aksara lebih baik dan tidak terjadi buta aksara kembali.</p>	
TAHUN ANGGARAN	2013	

ADVOKASI PERENCANAAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER BAGI MASYARAKAT SIPIL

Implementasi percepatan PUG melalui PPRG di berbagai daerah di Indonesia tidak terlepas dari kuatnya komitmen Pemerintah Daerah dalam pemenuhan prasyarat-prasyarat PUG. Hal paling serius yang masih menjadi tantangan daerah dalam penerapan PPRG adalah ketersediaan data terpilah gender untuk semua sektor dan penguasaan instrumen PPRG (GAP dan GBS).

Strategi persuasi yang dijalankan dengan melakukan assistensi teknis kepada Pemerintah Daerah dan DPRD terbukti cukup efektif memperbaiki dokumen perencanaan dan penganggaran suatu daerah lebih responsif gender. Meski perlu diingat, sisi kritis masyarakat sipil harus terus dijaga, agar tetap 'ada jarak' antara kerja-kerja teknokratis dengan kerja-kerja kritis.

Buku ini sengaja dibuat se'ringan' mungkin agar mudah dibawa, dibaca, dipahami, dan diimplementasikan oleh semua pihak, seperti kalangan masyarakat sipil, antara lain: aktivis LSM, akademisi, mahasiswa dan kelompok masyarakat lainnya, terutama yang bekerja di isu perencanaan dan penganggaran responsif gender.

Buku ini dan juga Juklak PPRG yang dikeluarkan oleh Kementerian, dapat dijadikan sebagai pegangan bagi Pemerintah Daerah (Pemda) dan DPRD untuk memperbaiki substansi (content) dokumen perencanaan dan penganggaran di daerah masing-masing agar lebih responsif gender.